



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah yang menjadi target capaian pembangunan di daerah pada akhir periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu. Pencantuman indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Target indikator kinerja daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 dalam bab ini disajikan dalam tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dikelompokkan berdasarkan indikator Program Pembangunan Daerah untuk memenuhi kinerja pada aspek: (1) Kesejahteraan Masyarakat, (2) Pelayanan Umum, dan (3) Daya Saing Daerah. Gambaran pemetaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tertera pada tabel berikut.



Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Belu

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	63,23	63,67	64,08	64,46	64,51	64,51
2	Persentase Stunting	persen	21,2	21	20	19	18	17	17
3	Persentase Penduduk Miskin	persen	15,37	15,28	15,07	14,94	14,79	14,70	14,70
4	Pertumbuhan Ekonomi	persen	0,4	1,25	2,45	3,65	4,85	5,1	5,1
5	TPT	persen	7,42	6	5	4	3	2	2
6	Inflasi	angka	1,14	1,08	1,03	0,98	0,93	0,88	0,88
7	Indeks GINI	indeks	0,32	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
8	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	30,19887	31,96	33,72	35,48	37,24	39,01	39,01
9	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	71,40	71,81	72,22	72,88	73,33	73,80	73,80
10	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	48,83	50	56	58	60	62	62
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88,64	88,73	88,82	88,91	89,00	89,09	89,09
12	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	persen	9,11	9,11	9,57	10,04	10,55	11,07	11,07
13	Persentase Desa Berkembang	persen	56,52174	63,76	66,66	69,56	72,46	78,26	78,26



Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Belu

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
a	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
a.1	Persentase Penduduk Miskin	persen	15,37	15,28	15,07	14,94	14,79	14,7	14,7
a.1.1	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	15,26	15,5	16	16,5	17	17,5	17,5
a.1.2	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	75,78	76	76,5	77	77,5	78	78
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
a	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja								
a.1	TPT	persen	7,42	6	5	4	3	2	2
a.1.1	Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	2,4	3,1	3,9	4,8	5,8	6,8	6,8
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
b.1.2	<i>Gender Vocal Point</i>	persen	0	20	40	60	80	100	100
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								
c.1.1	Skor PPH	angka	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3	85,5	85,50



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
d	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa								
d.1	Persentase Desa Berkembang	persen	56,52	63,76	66,66	69,56	72,46	78,26	78,26
d.1.1	Persentase BUMDES yang aktif	persen	56,52	65,22	73,91	82,61	91,30	100	100
e	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana								
e.1.1	<i>Total Fertility Rate (Rate)</i>	angka	2,98	2,9	2,83	2,77	2,7	2,61	2,61
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
a	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	63,23	63,67	64,08	64,46	64,51	64,51
a.1.1	Pengeluaran Riil per Kapita	Juta Rp	7,479	7,712	7,813	7,877	7,930	8,075	8,07
a.2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	0,40	1,25	2,45	3,65	4,85	5,10	5,10
a.3	Inflasi	angka	1,14	1,08	1,03	0,98	0,93	0,88	0,88
a.4	Indeks GINI	indeks	0,32	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	63,226	63,67	64,08	64,46	64,51	64,51
a.1.1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,35	7,37	7,37	7,52	7,61	7,71	7,71
a.1.2	Angka Harapan Sekolah	tahun	12,27	12,36	12,36	12,40	12,44	12,48	12,48



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
b	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
b.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	63,23	63,67	64,08	64,46	64,51	64,51
b.1.1	Angka Harapan Hidup	tahun	64,61	65,00	65,43	65,80	66,15	66,18	66,18
b.2	Persentase <i>Stunting</i>	persen	21,2	21	20	19	18	17	17
b.2.1	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	12,24	0	0	0	0	0	0
c	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat								
c.1.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	40	40	60	80	80	100	100
c.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	3,7	7,41	11,11	14,81	18,52	22,22	22,22
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
a	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup								
a.1	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	71,40	71,81	72,22	72,88	73,33	73,80	73,80
a.1.1	Indeks Kualitas Air	angka	58,67	59,01	59,35	59,69	60,04	60,39	60,39
a.1.2	Indeks Kualitas Udara	angka	92,88	92,99	93,1	93,21	93,32	93,34	93,34
a.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,56	54,60	55,73	57,93	59,20	60,54	60,54
a.1.4	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	17,81	18,23	18,63	19,02	19,4	19,76	19,76
b	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
b.1.1	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	persen	4,94	7,41	14,81	24,69	37,04	50,62	50,62
c	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								
c.1.1	SPBE	angka	0	1,5	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
d	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah								
d.1.1	Persentase UMKM Aktif	persen	76,03	79,82	83,82	88,04	92,38	97,03	97,03
e	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal								
e.1.1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	469,03	569,03	694,03	844,03	1019,03	1219,03	1219,03
e.1.2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15	15,19	15,37	15,54	15,69	15,83	15,83
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
a	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
a.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88,64	88,73	88,82	88,91	89,00	89,09	89,09
a.2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	48,83	50	56	58	60	62	62
a.2.1	Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/51,5	CC/52	CC/54	CC/56	CC/58	B/60	B/60
a.2.2	LPPD	angka	2,6	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	2,85
a.2.3	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	persen	25	37,5	51,79	67,86	83,93	100	100



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
b	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
b.1.1	Maturitas SPIP	angka	2,85	2,9	3	3	3	3	3
c	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan								
c.1.1	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	persen	100	100	100	100	100	100	100
c.1.2	Persentase capaian kinerja program	persen	100	100	100	100	100	100	100
d	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan								
d.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	persen	9,11	9,11	9,57	10,04	10,55	11,07	11,07
d.1.1	Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
e	Kepegawaian								
e.1.1	Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	persen	35	37,84	46,82	55,14	63,93	72,52	72,52
f.	Penelitian dan Pengembangan								
f.1.1	Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Skor	60,12	70	75	80	85	90	90
f.1.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	0	20	38,46	50	63,16	68,18	68,18
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang								
a.1	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	30,20	31,96	33,72	35,48	37,24	39,01	39,01
a.1.1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	60,6	61,99	63,4	66,23	67,65	69,07	69,07
a.1.2	Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	37,89	38,83	39,78	40,72	41,66	42,60	42,60
a.1.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	68,78	68,96	69,14	69,33	69,51	69,69	69,69
a.1.5	Rasio Jaringan Irigasi	angka	16,15	18,53	19,3	20,52	21,94	22,68	22,68
a.1.6	Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0	0	14,29	14,29	28,57	42,86	42,86
B	Urusan Pemerintah Pilihan								
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
a.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	993,19	1067,86	1115,96	1159,74	1207,49	1212,95	1.212,95
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata								
b.1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Miliar Rp	16,52	19,26	19,71	20,06	20,73	21,10	21,10
b.1.2	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	angka	90	115	140	165	190	215	215,00
c	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
c.1.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	627,42	680,63	724,99	763,91	803,58	807,23	807,23
d	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
d.1.1	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Miliar Rp	32,11	32,65	33,11	33,60	33,15	33,67	33,67

